

PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP DAMPAK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DALAM MENINGKTKAN KESEHJATRAAN MASYARAKAT DI DESA LERO TATARI KECAMATAN SINDUE

Abdul Razak¹, Hartawani², Sisrilnardi³

¹Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; razakladjaru@gmail.com

²Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

³Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

*Correspondence : razakladjaru@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Pemerintah, Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Kesejahteraan.*

Received. : 18 Juli

Revised. : 19 Juli

Accepted : 23 Agustus

ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Terhadap Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Lero Tatari. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif sedangkan Dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu pendekatan terhadap fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis Milles Saldana 2014. Sedangkan penentuan informan menggunakan Purposive. Teori yang digunakan menurut Muhadan Labolo dalam Ryaas Rasyid 2010 yaitu Peran sebagai Peran pemerintah sebagai fasilitator mengandung arti Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat, peran sebagai Regulator Dimensi yang di ukur kesepakatan yang telah di bangun pemerintah desa lero tatari dengan pihak pelaksana pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap, Dinamisator Peranan pemerintah sebagai dinamisator mengandung arti memberikan dorongan atau dukungan melalui himbauan kepada masyarakat Desa, Katalisator mengukur peran pemerintah sebagai katalisator yaitu peran pemerintah merespon berbagai aspirasi atau keluhan masyarakat terkait dengan adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa peran Pemerintah Desa terhadap pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum optimal dilihat dari peran fasilitator atau sebagai perpanjangan tangan masyarakat memanfaatkan peluang kerja dalam pembangunan pltu yang dilaksanakan oleh wika masih rendah dimana pemerintah melakukan peranya hanya sebatas membuat kelengkapan administrasi dan rekomendasi terhadap sebagian kecil masyarakat dari 1.696 orang jumlah penduduk yang terdiri anak-anak dan lansia berjumlah 845 orang sementara masyarakat yang

berproduktif berjumlah 851 orang orang adapun yang sudah bekerja di pltu sejumlah 57 orang sementara laki-laki yang belum bekerja atau berstatus pengangguran sekitar 794 orang masyarakat yang kehilangan pekerjaan padahal kita ketahui bersama sudah ada komunikasi yang dibangun oleh pt wika dan Pemerintah Desa. Sedangkan peran Pemerintah Desa sebagai regulator belum optimal disebabkan belum adanya kesepakatan berupa regulasi yang menjadi dasar masyarakat untuk dapat memanfaatkan peluang kerja dari pembangunan pltu oleh wika. Sedangkan dari aspek peran pemerintah sebagai dinamisator belum optimal dimana tidak adanya gerakan Pemerintah melihat masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pembangunan Pltu. Peran pemerintah sebagai katalisator juga belum optimal dimana sulitnya masyarakat menyampaikan aspirasi atau keluhan serta tidak berjalanya Bpd sebagai penyambung aspirasi masyarakat.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the role of the Village Government in the Impact of the Construction of a Steam Power Plant in Improving the Welfare of the Lero Tatari Village Community. This research uses a qualitative descriptive research type, while the research base used is descriptive, namely an approach to certain phenomena, events, problems or circumstances that are the object of investigation; the results of the findings are in the form of meaningful sentence descriptions. The data used in this research uses primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the Milles Saldana 2014 analysis technique. Meanwhile, determining informants uses Purposive. The theory used according to Mubadan Labolo in Ryaas Rasyid 2010 is the role of the government as a facilitator which means creating conducive conditions for development implementers to bridge various community interests, the role as a regulator. Dimensions that are measured by the agreement that the Lero Tatari village government has built with the parties implementing the construction of a steam power plant project, Dynamisator. The government's role as a dynamist means providing encouragement or support through appeals to the village community. Catalyst measures the government's role as a catalyst, namely the government's role in responding to various community aspirations or complaints related to the construction of a steam power plant. Based on the research results, it is stated that the role of the Village Government in development in improving the welfare of the community is not yet optimal, seen from the role of facilitator or as an extension of the community in taking advantage of job opportunities in the construction of the power plant carried out by Wika. a small part of the community of 1,696 people, the total population consisting of children and the elderly is 845 people, while the productive people are 851 people, there are 57 people who have worked at the hydropower plant, while the number of men who have not worked or are unemployed is around 794 people. lost his job even though we all know that there has been communication established by PT Wika and the Village Government. Meanwhile, the role of the Village Government as a regulator is not yet optimal due to the lack of agreement in the form of regulations which are the basis for the community to be able to take advantage of job opportunities from the construction of the PLTU by Wika. Meanwhile, from the aspect of the government's role as a dynamist, it is not yet optimal, where there is no government movement to see that people have lost their jobs due to the impact of the construction of the power plant. The government's role as a catalyst is also not optimal, where it is difficult for the community

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa maka penyelenggaraan, pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat desa benar-benar dilakukan oleh Pemerintah Desa guna terelenggaranya pemerintah yang baik demi kesejahteraan masyarakat Desa tentunya dapat dilihat dari potensi yang ada seperti sumber daya alam dan sumber daya manusianya sehingga peranan pemerintah dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan selalu mengarah pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Peran Pemerintah Desa sangat penting dan sangat berpengaruh dalam pengembangan untuk memajukan suatu Desa, pada faktanya masih banyak pemerintah desa belum maksimal dan menjalankan tugasnya dengan baik dengan bergerak untuk tercapainya kesejahteraan Desa sehingga menyebabkan terjadinya kurangnya pembangunan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Padahal kawasan Desa merupakan kawasan yang mempunyai potensi yang perlu dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga potensi tersebut memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa tersebut. Peran Pemerintah seharusnya mengacu pada potensi yang sudah dimiliki oleh Desa itu sendiri seperti memanfaatkan sumber daya yang di Desa sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan oleh masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peranan pemerintah Desa. Sebagaimana Desa lero tataru yang dapat dilihat secara geografis memiliki luas wilayah pemerintahan mencapai 13.000 Km², Desa Lero Tataru juga merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama ± 10 menit dengan tanah darat seluas ±20 Km² dan tanah sawah seluas ±62 Km² dan panjang pantai mencapai 9 Km² dari potensi inilah sehingga Desa lero tataru sangat strategis untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga uap yang dapat menopang kebutuhan listrik di daerah Kabupaten Donggala dan sekitarnya.

Pemerintah merencanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap pada tahun 2019 yang letaknya di Desa Lero Tataru tersebut adapun lahan yang akan dialihfungsikan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap yaitu lahan pertanian aktif masyarakat dengan luas mencapai 34 hektar dengan system ganti rugi lahan tentunya dengan pengalihfungsian lahan tersebut menyebabkan masyarakat yang profesinya sebagai petani akan kehilangan pekerjaannya akibat pembangunan tersebut. Adapun masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Lero hanya bergantung pada lahan

produktif pertanian yang dahulunya pendapatannya dapat menopang kebutuhan hidup mereka pengalihan fungsi lahan pertanian masyarakat menjadi lahan industry menjadikan perubahan yang sangat signifikan dikalangan masyarakat baik perubahan yang disebabkan akibat pembangunan tersebut maupun perubahan pola mata pencaharian masyarakat, perubahan tersebut bukan hanya berdampak pada masyarakat petani saja melainkan juga berdampak pada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sehingga dengan adanya pembangunan tersebut menyebabkan berkurangnya hasil tangkap nelayan dikarenakan pembangunan dan penimbunan pesisir pantai.

Proyek pembangkit listrik di Desa Lero Tatari di kerjakan oleh perusahaan wijaya karya (wika). Wika merupakan perusahaan pemenang tender pembangunan proyek tersebut sehingga perekrutan tenaga kerja melalui perusahaan tersebut. Pembangunan proyek yang dikerjakan wijaya karya dimulai pada tahun 2019 hingga saat ini banyak menyerap tenaga kerja baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja dari luar dimana tenaga kerja teknis banyak diisi oleh pekerja dari luar daerah sementara tenaga kerja non teknis di isi oleh tenaga kerja lokal. Tentunya melihat peluang kerja yang ada harusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Lero Tatari namun kenyataannya peluang kerja yang ada di lingkungan Pemerintahan Desa Lero Tatari masyarakatnya malah terabaikan dan peluang yang ada lebih dimanfaatkan oleh masyarakat dari luar.

Ketika mencermati permasalahan diatas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep yang dapat mengukur peran pemerintah yaitu konsep Muhadan Labolo dalam Ryas Rasyid (2010) yaitu Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, Regulator, Dinamisator, dan katalisator adapun Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator Dimensi yang di ukur adalah menjembatani kepentingan masyarakat desa lero tatari terhadap dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap. Peran pemerintah sebagai Regulator Dimensi yang di ukur kesepakatan yang telah di bangun pemerintah desa lero tatari dengan pihak pelaksana pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap terhadap peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti memanfaatkan peluang kerja.

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator memberikan dorongan atau dukungan melalui himbauan kepada masyarakat Desa, menanamkan kesadaran akan pentingnya kerja sama dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan, dan Peran Pemerintah sebagai Katalisator Mengukur peran pemerintah sebagai katalisator yaitu peran pemerintah merespon berbagai aspirasi atau keluhan masyarakat terkait dengan adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di desa lero tatari dapat memudahkan masyarakat mengajukan lamaran sesuai dengan kebutuhan. Dan peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu memberikan dorongan atau dukungan melalui himbauan kepada masyarakat Desa, menanamkan kesadaran akan pentingnya kerja sama dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan demi terwujudnya pembangunan Desa melalui

pemberdayaan. Dengan demikian hadirnya pembangunan Pembangkit listrik tenaga uap di Desa Lero Tatari diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas calon peneliti tertarik untuk mengkaji dan menelaah serta ingin mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa terhadap dampak pembangunan PLTU di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue Oleh karna itu peneliti mengambil judul. "Peran Pemerintah Desa Terhadap Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lero Tatari Kecamatan Sindue".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Yusuf (2014) penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari definisi yang sederhana penelitian kualitatif yaitu menemukan jawaban terhadap suatu pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis. Dengan demikian peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif agar dapat mendeskripsikan yang terjadi di lapangan. Peneliti berusaha menggambarkan tentang objek dan kajian penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Informasi yang disampaikan oleh informan kemudian dikumpulkan dan dianalisis, hasil analisis tersebut dapat berupa deskripsi kemudian diinterpretasi dan hasil akhirnya berupa laporan tertulis. Dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu pendekatan terhadap fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu Leksono (2013).

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki Nazir.M, (2003). Adapun alasan peneliti melakukan pendekatan kualitatif di dasarkan pada permasalahan yang di kaji oleh peneliti mengenai peran pemerintah terhadap Pembangunan pembangkit listrik di Desa Lero. Sehingga dalam penelitian memerlukan data yang sifatnya aktual dan konseptual.

Teknik Pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.. Peran pemerintah Desa dalam penelitian yang digunakan sebagai definisi konsep peran yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator Peran pemerintah sebagai fasilitator mengandung arti Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan, peran pemerintah sebagai regulator Dimensi yang di ukur kesepakatan yang telah dibangun pemerintah desa lero tatari dengan pihak pelaksana pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap terhadap peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti memanfaatkan peluang kerja., peran pemerrintah sebagai dinamisator Peranan pemerintah sebagai dinamisator mengandung arti memberikan dorongan atau dukungan melalui himbauan kepada masyarakat Desa, menanamkan kesadaran akan pentingnya kerja sama dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan, peran pemerintah sebagai katalisator Mengukur peran pemerintah sebagai katalisator yaitu peran pemerintah merespon berbagai aspirasi atau keluhan masyarakat terkait dengan adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di desa lero tatari.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder adapun data primer dalam penelitian ini Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama dilapangan, diperoleh melalui hasil pengisian matriks kerja dan wawancara langsung dengan para informan yang terpilih terkait dengan apa yang diteliti yaitu tentang Peran pemerintah desa. Sedangkan data sekunder Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh melalui orang lain maupun dari buku, dokumen, arsip, koran, dan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun analisis data yang digunakan yaitu Milles Saldana (2014) Analisis data yang digunakan pengumpulan data Pengumpulan data merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data dari informan secara langsung, maupun dari dokumen dan arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, reduksi data Reduksi data merupakan komponem pertama dalam analisis merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data. Pada waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan dari catatan data yang diperoleh dari lapangan, penyajian data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan, simpulan penelitian dapat dilakukan, sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan mudah dipahami. dan penarikan kesimpulan Simpulan perlu diferifikasi agar cukup mantap dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan oleh karena itu, perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemetaan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibatpikiran kedua yang melintas pada peneliti pada waktu penulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Desa Terhadap Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Desa Lero Tatari yang dilaksanakan oleh wika dimulai sejak tahun 2020 dimana pembangunan tersebut merupakan lahan masyarakat yang masih aktif digunakan sebagai lahan pertanian maka dengan masuknya pembangunan pembangkit listrik yang dilaksanakan oleh wika sebagai perusahaan yang memenangkan tender lahan tersebut di alihfungsikan menjadi lahan industri tentunya dengan pengalihfungsian lahan inilah yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pembangunan tersebut khususnya masyarakat petani, disamping itu masyarakat nelayan juga mengalami dampak atas pembangunan tersebut seperti penimbunan air laut dan pembangunan pelabuhan mengakibatkan berkurangnya hasil tangkap nelayan disekitar. Maka dari itu pembangunan pembangkit listrik tenaga uap menyebabkan masyarakat kehilangan pekerjaan akibat pembangunan tersebut.

Pembangunan yang dilaksanakan wika banyak menyerap tenaga kerja seperti tenaga kerja buruh bangunan dan tenaga kerja teknis dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pembangunan tersebut tentunya menjadi cerminan bagi Pemerintah Desa melihat masyarakatnya yang banyak kehilangan pekerjaan akibat pembangunan tersebut. Tentunya dengan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan akan berpengaruh pada penghasilan masyarakat ketika penghasilan masyarakat rendah maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun pula maka dari itu dengan terbukanya peluang kerja dimasyarakat akibat pembangunan tersebut sangat diharapkan peranan pemerintah menjadi fasilitator atau perpanjangan tangan masyarakat, peranan pemerintah sebagai regulator dan peranan pemerintah sebagai motivator agar masyarakat yang tadinya tidak bekerja dengan peranan Pemerintah Desa tersebut dapat bekerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lero Tatari sehingga dari itu peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan indikator sebagai pisau analisis dalam penelitian ini sebagai berikut.

2. Peranan Pemerintah Sebagai Fasilitator

Pentingnya peran Pemerintah Desa Lero Tatari sebagai fasilitator atau perpanjangan tangan masyarakat dalam memfasilitasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pembangunan tersebut. Wika merupakan pelaksana pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Desa Lero Tatari dengan membuka banyak peluang kerja bagi masyarakat setempat khususnya masyarakat Desa Lero Tatari tetapi pengamatan peneliti menunjukkan banyaknya masyarakat Desa Lero Tatari yang belum memanfaatkan kesempatan atau peluang kerja yang ada di Desa mereka

padahal kita ketahui peluang kerja yang ada tentunya juga akan diperuntuhkan pada masyarakat lokal atau masyarakat Desa Lero tatari itu sendiri. Maka dari itu salah seorang informan Bapak Anton selaku tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan menyatakan :

Kami sebagai nelayan yang terkena dampak akibat pembangunan pelabuhan dan penimbunan pantai perlu menjadi perhatian pemerintah belum memfasilitasi masyarakat untuk dapat memanfaatkan peluang kerja di pltu padahal banyak sekali peluang kerja karena tidak pernah di fasilitasi kami sebagai masyarakat akhirnya peluang ini di manfaatkan oleh orang lain yang kami harapkan pemerintah bisa menjadi perpanjangan tangan agar kami bisa bekerja juga disana. *(Hasil wawancara Kamis 18 April 2024)*

Berdasarkan hal tersebut hal yang sama disampaikan oleh salah seorang informan selaku nelayan bapak Ilham menyatakan bahwa :

Selama ini Pembangunan PLTU ini banyak sekali menyerap tenaga kerja karena tidak ada peranan pemerintah akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain ratusan pekerja yang diterima masyarakat di lero ini terabaikan. Tidak pernah difasilitasi masyarakat tidak pernah mengundang masyarakat untuk duduk bersama mengenai peluang kerja ini. Kami sebagai nelayan yang hasil tangkap kami suda berkurang akibat pembangunan juga berharap kerja disana tetapi belum pernah di ada panggilan padahal suda memasukan permohonan. *(Hasil wawancara Jumat 19 April 2024)*

Pengamatan peneliti juga menggambarkan bahwa dengan kurangnya peran Pemerintah sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam memanfaatkan peluang pembangunan Pltu di Desa Lero Tatari memberikan keleluasaan bagi masyarakat luar sehingga masyarakat lokal atau masyarakat Desa Lero Tatari telah terabaikan padahal kita tau bersama harusnya peluang tersebut lebih dimanfaatkan oleh masyarakat lokal itu sendiri sehingga masyarakat yang kehilangan pekerjaan tersebut memiliki pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lero Tatari itu sendiri.

Berdasarkan fakta di atas Pemerintah Desa tentunya memiliki kejelian melihat peluang-peluang yang ada di Desa Lero Tatari kita ketahui bersama ketika peluang ini dapat dimanfaatkan dengan baik tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat baik meningkatkan keehjatraan masyarakat Desa Lero Tatari itu sendiri maupun dapat menambah penghasilan masyarakat maka dari itu dengan peluang kerja yang ada harusnya pemerintah Desa dapat berperan sebagai fasilitator atau menjadi perpanjangan tangan sehingga masyarakat yang tadinya belum mendapat pekerjaan dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dia miliki. dari

hal tersebut salah seorang informan Bapak Umurjin selaku Kepala Desa menyatakan bahwa :

Dengan adanya pembangunan PLTU yang dilaksanakan oleh pt wika menyerap sebagian tenaga kerja khususnya masyarakat desa lero tatari sendiri sehingga kesempatan inilah yang di manfaatkan masyarakat tetapi tidak semua masyarakat yang bisa kerja disana hanya sebagian saja sehingga kami membantu apabila ada masyarakat yang datang ke kami bantu melengkapi administrasinya dan bahkan ada sebagian kami buat rekomendasi setelah itu mereka antar ke wika. *(Hasil Wawancara Selasa 16 April 2024)*

hal tersebut salah seorang informan Bapak Arfan selaku pemerintah desa yaitu sekretaris desa menyatakan bahwa :

Ketika masyarakat mendapat kendala seperti masalah gaji mereka yang sudah bekerja disana datang ke kami mengeluhkan masalah gaji dan kami tidak memiliki wewenang untuk memecahkan permasalahan itu makanya kami selalu kembalikan ke wika. jadi kami sebagai pemerintah desa menghubungi wika membicarakan masalah ini dan pihak wika selalu berkomunikasi dengan kami. *(Hasil Wawancara Rabu 17 April 2024)*

Dari peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator atau sebagai perpanjangan tangan masyarakat memanfaatkan peluang kerja dalam pembangunan pltu yang dilaksanakan oleh wika masih masih rendah dimana pemerintah melakukan peranya hanya sebatas membuat kelengkapan administrasi dan rekomendasi terhadap sebagian kecil masyarakat dari 1.696 orang jumlah penduduk yang terdiri anak-anak dan lansia berjumlah 845 orang sementara masyarakat yang produktif berjumlah 851 orang adapun yang sudah bekerja di pltu sejumlah 57 orang sementara laki-laki yang belum bekerja atau berstatus pengangguran sekitar 794 orang masyarakat yang kehilangan pekerjaan padahal kita ketahui bersama sudah ada komunikasi yang dibangun oleh pt wika dan Pemerintah Desa terkait dengan perekrutan tenaga kerja tetapi Pemerintah Desa tidak menindaklanjuti komunikasi tersebut sehingga peluang ini dimanfaatkan oleh pekerja dari luar. Fakta ini menggambarkan bahwa ketika masyarakat sudah memiliki pekerjaan tentunya akan memiliki penghasilan dan ketika masyarakat sudah berpenghasilan masyarakat tersebut dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera.

1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peranan Pemerintah sebagai regulator mengandung arti Menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui berupa kesepakatan sebagai regulator, pemerintah desa memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pembangunan. Dimensi yang di ukur kesepakatan yang telah di bangun antara pemerintah desa

dengan pihak wika sebagai pelaksana pembangunan yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga dengan penyerapan tenaga kerja dilingkungan Pemerintahan Desa Lero Tatari masyarakat Desa Lero Tatari yang belum memiliki pekerjaan dapat diberdayakan melalui kesepakatan yang dibangun. Berdasarkan hal tersebut salah seorang informan Bapak Saiful selaku tokoh masyarakat berprofesi sebagai petani yang menyatakan bahwa :

“Dengan adanya peluang kerja di pltu yang dilaksanakan oleh wika selama ini kami dan masyarakat lainya belum pernah di ajak atau di undang oleh pemerintah untuk duduk besama membicarakan masalah tenaga kerja yang ada di wika memang pernah sempat saya dengar dengan pak sekdes pak arfan bahwa pengrekrutan tenaga kerja yang masuk ke wika melalui pemerintah desa tapi sampai saat ini tidak ada juga realisasinya seperti kami dan masyarakat lainya di undang untuk duduk bersama” (*Hasil Wawancara Kamis 18 April 2024*).

Berdasarkan pernyataan di atas hal yang sama disampaikan salah seorang informan selaku tokoh masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan Bapak Anton menyatakan bahwa :

“Kami sebagai nelayan ini harusnya di utamakan kerja disana karena akibat dari pembangunan pelabuhan, penimbunan air laut harusnya ada kesepakatan melalui musyawarah oleh pemerintah desa dengan wika sehingga masyarakat ini bisa di atur masuknya tapi sampai saat ini tidak tertaur karena tidak ada kesepakatan” (*Wawancara Jumat 19 April 2024*).

Peranan Pemerintah dalam memanfaatkan peluang kerja yang di wilayah keperintahanya merupakan peluang yang sangat positif bagi masyarakatnya maka dari itu peluang inilah yang harusnya dibuatkan kesepakatan terkait penyerapan tenaga kerja di wilayah keperintahan Desa Lero Tatari sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesehjatraan masyarakatnya. Sesuai dengan hal tersebut salah seorang informan selaku sekertaris desa Bapak Arfan Menyatakan bahwa :

“Kalau berbicara regulasi kami belum bicarakan regulasi dengan pihak wika, terkait dengan pengrekrutan tenaga kerja mungkin dengan pemerintah sebelumnya ada kesepkatan kalau komunikasi kami sampai saat ini cukup lancar dengan wika” (*Wawancara Rabu 17 April 2024*).

Hal yang sama disampaikan salas seorang inform selaku kepala desa menyatakan bahwa :

“Berbicara kesepakatan yah belum ada kesepakatan sampai saat ini tetapi kami sebagai pemerintah desa Berupaya bagaimana pihak dari wika menerima pekerja lokal seperti mengajukan kepada wika, selama ini suda di ajukan tetapi

belum ada respon mungkin wika memiliki aturan tersendiri dalam perekrutan tenaga kerja tetapi dalam bentuk lisan, jadi tidak semua pemerintah yang menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk bekerja di wika" (*Wawancara Rabu 17 April 2024*).

Berdasarkan pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa dengan terbukanya peluang kerja dalam pembangunan pltu yang dilaksanakan oleh pt wika sampai saat ini belum ada regulasi atau kesepakatan yang dibuat antara kedua pihak mengenai perekrutan tenaga kerja. Menyikapi hal ini tindakan Pemerintah Desa dengan melakukan pengajuan secara tertutup berdasarkan pernyataan informan di atas merupakan tindakan yang tidak sewajarnya harusnya Pemerintah Desa sebelum melakukan pengajuan harus melakukan musyawarah antara Pemerintah dan masyarakat. Adapun komunikasi yang sudah dibangun oleh pemerintah desa dengan pt wika masih dilakukan sebatas komunikasi secara lisan terkait perekrutan tenaga kerja dengan adanya komunikasi ini harusnya ditindak lanjuti agar terjadi kesepakatan berupa regulasi yang memudahkan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Berdasarkan hal tersebut hal yang berbeda disampaikan seorang informan Direktur Pt Wika bapak Hj Purwanto mengatakan bahwa :

"Di awal sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah desa adalah terkait dengan tenaga kerja dan ada beberapa orang yang di ajukan hanya sebagian melalui pak Kades dan pak Sekdes setelah itu tidak ada lagi hanya sebagian itu saja sementara kami sudah butuh karena kebutuhan dilapangan memang banyak akhirnya kami terimah ada yang melalui mandor kami dan ada yang datang langsung ke kantor kami dan tidak berpaku pada pemerintah desa lagi sehingga pelamar itu banyak dari luar kalau terpaku dengan pemerintah desa setengah mati idealnya lewat pemerintah desa kalau itu terjadi lebih mudah masyarakat khususnya masyarakat Desa Lero Tatari dan kami dari perusahaan mengajukan beberapa prosedur kalau dari masyarakat Desa Lero Tatari kemungkinan kami mudahkan" (*Wawancara Senin 22 April 2024*).

Berdasarkan beberapa pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah sebagai regulator atau kesepakatan terkait dengan perekrutan tenaga kerja oleh pt wika dalam pembangunan pltu masih sangat kurang hal itu disebabkan belum adanya kesepakatan yang dibangun terkait perekrutan tenaga kerja sehingga masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dampak pembangunan pltu belum semuanya merasakan dampak positifnya yaitu dapat memanfaatkan peluang kerja melalui peranan pemerintah yang menjadi acuan atau pegangan dasar berupa regulasi sehingga masyarakat yang tadinya kehilangan pekerjaan akibat pembangunan pltu belum dapat bekerja dan memanfaatkan peluang kerja dari pembangunan pltu.

2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Pentingnya peran pemerintah sebagai dinamisator dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini pemerintah desa melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan terhadap masyarakatnya. Pemerintah Desa sebagai dinamisator harus mampu menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan yang ingin dicapai nantinya. Dalam penelitian ini peranan Pemerintah Desa Lero Tatari sebagai dinamisator mengandung arti memberikan dorongan atau dukungan melalui himbauan kepada masyarakat, menanamkan kesadaran akan pentingnya kerja sama dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan demi terwujudnya pembangunan Desa melalui pemberdayaan masyarakat maka dari itu hadirnya wika sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur pltu pemerintah pemilki peran dalam memberikan dorongan melalui himbauan bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan kesempatan atau peluang kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Desa Lero Tatari. maka dari itu sebagaimana disampaikan salahseorang informan Bapak Umurjin selaku Kepala Desa menyatakan bahwa :

Selama ini kami belum pernah melakukan atau menyampaikan himbauan terhadap warga secara keseluruhan karena masih terbatas dengan waktu harusnya masyarakat yang bergerak aktif melihat peluang yang ada seperti peluang usaha di lingkungan proyek pembangunan Pltu karena pekerja pasti memerlukan seperti makanan dan masih banyak peluang lain. *(Wawancara Selasa 16 April 2024)*

Hal yang sama disampaikan salah seorang informan Bapak Arfan selaku sekretaris desa menyatakan bahwa :

Dengan hadirnya pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pt wika Kami sebagai pemerintah menunggu masyarakat agar memanfaatkan peluang yang ada memang selama ini langkah kami lakukan himbaun atau dorongan tersebut dengan masyarakat belum dilakukan dalam bentuk sosialisasi hanya kami sampaikan begitu saja. *(Wawancara Rabu 17 April 2024)*

Tentunya menyikapi hal tersebut peranan pemerintah sebagai dinamisator perlu ditingkatkan lagi apakah dalam proses himbauan berupa dorongan terhadap masyarakat dilakukan dalam bentuk sosialisasi atau ada strategi lain sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Ketika peranan Pemerintah sebagai dinamisator berhasil dilakukan tentunya juga akan berpengaruh pada meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Lero Tatari lebih meningkat. Kesejahteraan masyarakat meningkat tidak terlepas dari peranan Pemerintah sebagai dinamisator atau himbauan dan dorongan begitu penting karena peranan pemerintah

sebagai dinamisator juga merupakan merupakan tindakan atau gerakan bersama dalam membangun sebuah Desa. Desa tidak akan meningkat ketika tidak ada keselarasan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat maka dari itu salah seorang informan Bapak Saiful selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa :

Pemerintah Desa hanya menghimbau dilakukan begitu saja tidak ada tindak lanjut sehingga kami sebagai masyarakat juga bertanya-tanya sementara oarng luar yang mengajukan lamaran langsung dipanggil kalau penyampaian pemdes ini dia tindak lanjuti mungkin agak mudah kami masuk sebagai pekerja. *(Hasil Wawancara Kamis 18 April 2024)*

Berdasarkan hal tersebut salah seorang informan selaku nelayan bapak Ilham menyatakan sebagai berikut :

Memang selama ini di himbau begitusaja saja masyarakat tetapi tidak ada tindak lanjut contohnya ada masyarakat termaksud saya juga satu disampaikan kepala desa dengan hadirnya pltu mari kita manfaatkan banyak peluang kerja dan peluang usaha ketika memasukan berkas ke desa untuk bekerja sampai saat ini tidak pernah dipanggil untuk kerja disana itu sebabnya banyak masyarakat yang mengeluh. *(Hasil wawancara Jumat 19 April 2024)*

Berdasarkan beberapa pernyataan informan di atas dapat disimpulkan peranan pemerintah sebagai dinamisator belum optimal disebabkan gerakan pemerintah melalui himbauan hanya penyampaian begitu saja tanpa ada tindak lanjut dan himbauan tersebut disampaikan hanya kepada sebagian masyarakat sehingga dengan adanya penyampaian berupa himbauan atau terkait dengan peluang kerja hanya dimanfaatkan sebagian kecil masyarakat Desa Lero Tatari.

3. Peran Pemerintah Sebagai Katalisator

Begitu pentingnya Peranan Pemerintah sebagai katalisator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana peranan pemerintah sebagai katalisator adalah berbagai bentuk peranan yang dilakukan pemerintah sebagai agen perubahan di desa lero tatari sehingga dalam mengukur peran pemerintah sebagai katalisator yaitu peran pemerintah merespon berbagai keluhan masyarakat terkait dengan adanya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Desa Lero Tatari. sehingga dapat dilihat seberapa jauh peran pemerintah merespon lebih jauh keluhan dan aspirasi masyarakatnya maka dari hal tersebut salah seorang informan bapak Anton menyatakan bahwa :

Saya sebagai masyarakat Desa Lero Tatari sampai saat ini tidak tau kemana ke BPD tetapi anggota BPD di dusun kami yaitu di dusun empat selalu tidak ada di tempat mengeluh ke pemerintah tidak merespon keluhan kami. Ternyata BPD bekerja sebagai security di proyek pembangunan Pltu harusnya aduan kami ini

Bpd yang aspirasikan malah BPD nya kerja di Pltu bukan masyarakatnya.
(Wawancara Jumat 19 April 2024)

Hal yang sama disampaikan salah seorang informan bapak Saiful yang menyatakan bahwa:

Selama keluhan masyarakat terkait dengan peluang kerja dalam pembangunan Pltu selama ini hanya di dengar selalu pemerintah mengatakan ke Bpd dulu sementara Bpd tidak ada di tempat bahkan Bpd tidak pernah melakukan sosialisasi di masyarakat atau dengar pendapat jadi keluhan kami selama ini tidak ada artinya hanya sia-sia saja. (Hasil Wawancara Kamis 18 April 2024)

Peran pemerintah desa lero tatari sebagai katalisator dapat disimpulkan bahwa belum optimal dimana sulitnya masyarakat Desa Lero Tatari menyampaikan keluhan dan tidak berjalanya lembaga Bpd sebagai penyambung aspirasi masyarakat terkait masyarakat yang belum memanfaatkan peluang kerja pada pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Desa Lero Tatari. Peran pemerintah sebagai katalisator begitu penting bagi suatu peningkatan Desa karena dengan katalisator Pemerintah Desa dapat mengetahui permasalahan yang ada di desanya melalui keluhan atau aspirasi secara langsung dari masyarakat sehingga masukan dan aspirasi itulah yang tentunya akan diselesaikan oleh Pemerintah Desa itu sendiri.

KESIMPULAN

Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator atau sebagai perpanjangan tangan masyarakat belum optimal dimana peran pemerintah menjadi perpanjangan tangan masyarakat masih sebatas membuat kelengkapan administrasi dan rekomendasi bagi sebagian kecil masyarakat sehingga masih banyak masyarakat belum memanfaatkan peluang kerja atau belum memiliki pekerjaan dari 1.696 orang jumlah penduduk adapun yang sudah bekerja di pltu sejumlah 57 orang masih ada 3,36% orang masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pembangunan pltu padahal pihak wika suda melakukan komunikasi pengrekrutan tenaga kerja dari Desa tetapi Pemerintah Desa tidak menindaklanjutinya. Peran Pemerintah Desa sebagai regulator masih rendah dikarenakan belum adanya kesepakatan berupa regulasi yang menjadi dasar masyarakat untuk dapat mempermudah masyarakat untuk memanfaatkan peluang kerja dari pembangunan pltu oleh wika. Peranan Pemerintah sebagai dinamisator belum optimal dimana tidak adanya gerakan pemerintah melihat masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pembangunan Pltu. Sedangkan peran Pemerintah sebagai Katalisator juga belum optimal dimana sulitnya masyarakat desa lero tatari menyampaikan keluhan dan tidak berjalanya lembaga Bpd sebagai penyambung aspirasi masyarakat terkait peluang kerja pada pembangunan pembangkit listrik tenaga uap

REFERENSI

- Afifudin 2010. *Pengantar Admnistras Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta.
- Afifuddin dan Saebandi Beni Ahma, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006, *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta, Graha Ilmu
- Amira. 2012, *Sosiologi Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bernand, Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern* : Prestasi Jakarta
- Harun, Rochajat&Ardianto Elvinaro. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Leksono, S 2013 *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi. Dari metodologi ke metodologi*. Edisi .1 cetakan satu Jakarta : Rajawali Pers Grafindo Persada
- Muhadan Labolo, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rianeka Cipta.
- Nasution, Zulkarnain. 2007. *Komunikasi Pembangunan (Pengenaln Teori dan Penerapannya)* Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Pahmi, 2010. *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*. Jakarta: Gunung Persada Press.
- Ryaas Rasyid, 2010. *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Rivai, Veithzal.2004. *Kepemimpinan Jakarta* : PT. Raja Grafindo Persada..
- Syafiee Inu Kencana, 2013. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung Rafika Aditama.
- Sugiyono, 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. R dan D Bandung : Alfabeta Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. R dan D Bandung : Alfabet
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R dan D*. Bandung. Alfabeta, Cet. 20.
- Yusuf, A. M. (t.t.-b) 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group.